



Dana Desa dan Upaya Pengentasan Kemiskinan di Kabupaten Subang

Village Fund and Alleviation Efforts in Subang Districts

Teguh Aditia Pratama¹, Bambang Juanda¹, Sri Mulatsih¹

Diterima: 21 Mei 2021

Disetujui: 14 November 2022

Abstrak: Proses pembangunan wilayah selalu disertai dengan isu sosial didalamnya seperti kemiskinan dan ketimpangan pendapatan terutama di daerah perdesaan. Dana Desa merupakan amanat Undang-Undang Desa Nomor 6 sebagai bentuk implementasi kebijakan dalam mendorong pemerataan pembangunan di wilayah perdesaan. Kajian ini bertujuan untuk dapat memetakan kemiskinan secara spasial serta mengetahui faktor lain yang memiliki pengaruh terhadap kemiskinan di Kabupaten Subang. Perhitungan Indeks Moran menunjukkan sebaran spasial kemiskinan di Kabupaten Subang memiliki pola menggerombol (clustered) dengan nilai indeks sebesar 0.425. Selain itu, terdapat 42 Desa yang berada dalam cluster High-High dan 48 desa yang masuk ke dalam Cluster Low-Low berdasarkan Moran Scatterplot. Adapun faktor berpengaruh terhadap kemiskinan berdasarkan analisis regresi yaitu jarak tempuh dari desa ke ibukota kabupaten, belanja bidang pemerintahan, belanja bidang pembangunan, belanja bidang pemberdayaan, luas sawah dan luas desa.

Kata kunci: Kemiskinan, Dana Desa, Indeks Moran, Regresi

Abstract: The process of regional development is always accompanied by social issues such as poverty and income inequality, especially in rural areas. The Village Fund is a mandate if Village Law number 6 as a form of policy implementation in encouraging equitable development in rural areas. This study aims to be able to spatially map poverty and find out other factors that influence poverty in Subang Regency. Moran's Index shows that the spatial distribution of poverty in Subang Regency has a clustered pattern with an index value of 0.425. In addition, there are 42 villages in the High-High cluster and 48 villages in the Low-Low cluster based on Moran Scatterplot. Based on regression analysis, the factors that influence poverty in Subng Regency are the distance from the village to the district capital, spending on government administration, spending on development, spending on community empowerment, the area of rice fields and the area of the village,

Keywords: Poverty, Fund Village, Moran Index, Regression

PENDAHULUAN

Isu kemiskinan menjadi diskursus dan isu utama di berbagai belahan dunia tidak terkecuali Indonesia. Berbagai definisi kemiskinan dan alat ukur kemiskinan telah dikemukakan oleh para ahli beserta upaya dalam menanggulangnya. Tantangan utama dalam upaya penanggulangan kemiskinan tidak hanya dapat dilihat sebatas dari rendahnya tingkat pendapatan dan tingkat konsumsi seseorang. Akan tetapi pengentasan kemiskinan harus dapat dilihat secara komprehensif dan multidimensi baik dari sisi struktural maupun

¹ Prodi Ilmu Perencanaan Pembangunan Wilayah dan Pedesaan, Fakultas Ekonomi dan Manajemen, Sekolah Pascasarjana IPB University, Bogor, Indonesia

Korespondensi: teguhaditya89@gmail.com

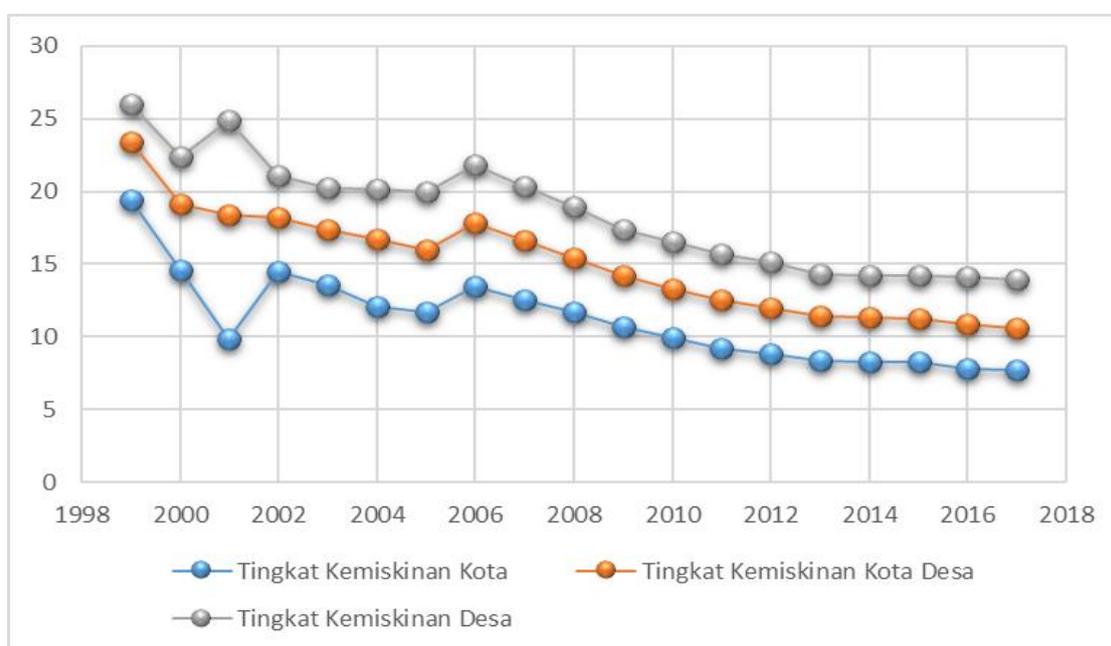
DOI: 10.14710/tataloka.27.1.13-24

Copyright © 2025 by Authors, Published by Universitas Diponegoro Publishing Group.

This open-access article is distributed under a Creative Commons Attribution (CC-BY-NC-SA) 4.0 International license.

kultural (Mehta *et al.*, 2018; Nurwati, 2008). Sugiyarto *et al* (2015) mengungkapkan bahwa penyusunan suatu rumusan kebijakan yang terukur, efektif dan efisien dalam upaya penanggulangan kemiskinan harus didasarkan kepada data dan informasi terkait kemiskinan dan kesenjangan yang ada di masyarakat.

Dalam dokumen perencanaan pembangunan pemerintah yang bersifat jangka Panjang (RPJP), menengah (RPJMN), maupun bersifat tahunan (RKP) pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan merupakan isu krusial dan fokus utama dalam proses pembangunan dan pengembangan wilayah. Pembangunan yang dilakukan baik oleh pusat maupun daerah perlu memperhatikan aspek pemerataan disamping aspek pertumbuhan. Bourguignon (2004) mengatakan bahwa tidak hanya pertumbuhan ekonomi saja yang memiliki pengaruh dalam upaya penanggulan kemiskinan, akan tetapi terdapat faktor lain seperti distribusi pendapatan sebagai faktor lainnya dalam upaya penurunan kemiskinan. Sehingga pemerataan pembangunan menjadi tolak ukur yang penting dalam proses pengurangan ketimpangan antar wilayah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.



Sumber: Badan Pusat Statistik (2019)

Gambar 1. Tingkat Kemiskinan di Wilayah Perdesaan dan Perkotaan di Indonesia (%)

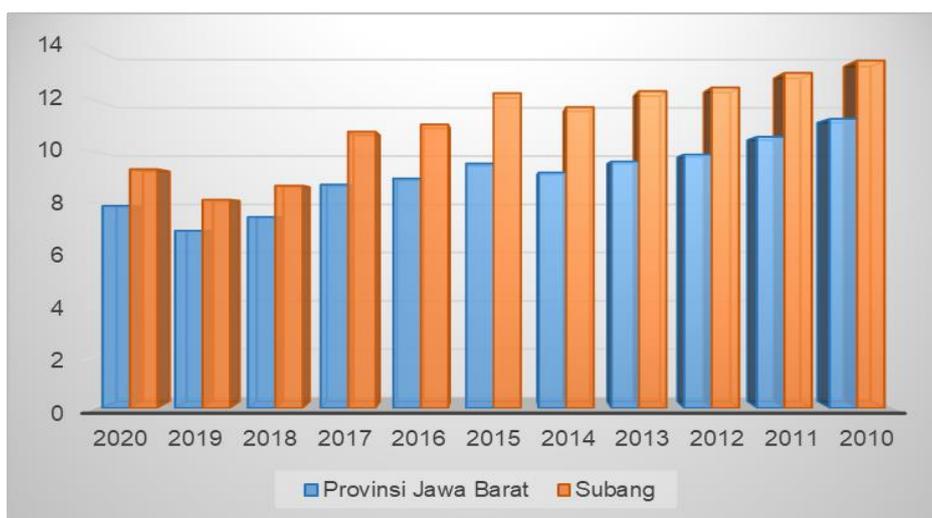
Ketimpangan antar wilayah terutama antara desa dan kota semakin membuat desa menjadi institusi lokal yang lebih diperhatikan perkembangannya. Badan Pusat Statistik (2019) mencatat bahwa tingkat kemiskinan di wilayah perdesaan lebih tinggi jika dibandingkan dengan tingkat kemiskinan di wilayah perkotaan seperti yang terlihat di Gambar 1. Hasibuan *et al.*, (2019) menyebutkan bahwa kemiskinan di perdesaan merupakan representasi kemiskinan di Indonesia dimana sebagian besar penduduknya masih berada di garis kemiskinan.

Desentralisasi fiskal selain bertujuan untuk percepatan dan pemerataan pembangunan, juga bertujuan dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan. Lin & Liu (2000) mengungkapkan bahwa desentralisasi fiskal yang diiringi dengan reformasi perdesaan memberikan kontribusi yang signifikan bagi

pertumbuhan ekonomi di China. Selain itu, desentralisasi fiskal menjadi salah satu instrumen dalam mengatasi kesenjangan pembangunan secara efektif dan efisien melalui *good governance* (Juanda & Heriwibowo, 2016).

Undang-Undang Desa Nomor 06 yang telah disahkan merupakan kebijakan desentralisasi fiskal yang memiliki implikasi nyata terhadap legitimasi desa dimana dengan lahirnya undang-undang ini desa dapat lebih “leluasa” dalam proses perencanaan pembangunan dan pengembangan desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat (Aziz, 2016). Selain itu, Undang-Undang Desa juga menjadikan desa sebagai subjek pembangunan dengan memberikan kewenangan kepada desa dalam tata kelola pemerintah desa yang lebih akuntabel dan transparan yang bertujuan untuk peningkatan pelayanan publik serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Kabupaten Subang di Provinsi Jawa Barat memiliki persoalan dan tantangan yang sama dalam proses pengentasan kemiskinan. Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat (2020) mencatat tingkat kemiskinan di Kabupaten Subang berada diatas tingkat kemiskinan rata-rata kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat (Gambar 2). Aspek spasial tentunya menjadi penting dalam memetakan kebijakan yang tepat dalam upaya penanggulangan kemiskinan, karena terdapatnya berbagai objek didalam suatu sistem kewilayahan tersebut (Rustiadi *et al.*, 2011). Selain itu, Nashwari *et al.*, (2016) menekankan bahwa perhatian terhadap aspek spasial maupun karakteristik suatu wilayah, kebijakan akan lebih terarah dan berimbang.



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat (2020)

Gambar 2. Tingkat Kemiskinan di Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten Subang (%)

Dana Desa diharapkan dapat menjadi daya ungkit (*leverage*) dalam lingkup lokal desa sebagai upaya peningkatan kesejahteraan dan pengentasan kemiskinan. Perencanaan anggaran yang berkualitas diharapkan dapat memberikan perkembangan yang positif bagi pembangunan di wilayah perdesaan.

Hasibuan *et al.*, (2019) dalam kajiannya menyebutkan bahwa Dana Desa belum memberikan pengaruh yang signifikan dalam upaya mereduksi kemiskinan. Hal ini dikarenakan masih terfokusnya Dana Desa pada belanja bidang pembangunan khususnya infrastruktur dimana dampak dari pembangunan infrastruktur ini baru dapat dirasakan beberapa tahun mendatang (Artino *et al.*, 2019). Selain itu, Azhari (2019) dengan kajian terkait Dana Desa di Kabupaten Lebak menyebutkan bahwa belanja bidang pemerintahan desa, belanja pemberdayaan serta belanja pembinaan masyarakat berpengaruh dalam

upaya penanggulangan kemiskinan. Sedangkan untuk belanja infrastruktur belum memberikan kontribusi positif dalam penurunan kemiskinan di Kabupaten Lebak. Berdasarkan permasalahan tersebut, kajian ini mencoba (1) mengetahui sebaran spasial kemiskinan di Kabupaten Subang serta (2) mengetahui faktor lain yang berpengaruh terhadap kemiskinan di Kabupaten Subang. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif serta sebagai landasan yang dapat dipertimbangkan oleh para pemangku kepentingan (*stakeholders*) dalam proses pembangunan daerah khususnya di Kabupaten Subang dalam proses penanggulangan kemiskinan.

METODE

Metode dalam kajian ini bersifat deskriptif-kuantitatif. Adapun sumber data, bersumber dari data primer maupun sekunder. Indeks Moran digunakan untuk mengetahui dan menganalisis sebaran spasial kemiskinan sedangkan analisis regresi linear berganda untuk melihat variabel lain yang berpengaruh terhadap kemiskinan di Kabupaten Subang. Jenis data yang digunakan merupakan data *cross section* tahun 2018 untuk variabel bebas (independen) dan 2019 untuk variabel dependen. Variabel dependen dalam kajian ini terdiri dari jumlah penduduk miskin per luas wilayah sedangkan untuk variabel independen terdiri dari jarak tempuh dari desa ke ibukota, belanja desa bidang pemerintahan, belanja bidang pembangunan, belanja pemberdayaan, luas wilayah, dan luas sawah. Data tersebut digunakan untuk mengetahui variabel apa saja memiliki pengaruh yang nyata terhadap penurunan kemiskinan. Desa menjadi unit analisis dalam kajian ini dengan jumlah amatan sebanyak 245 observasi (desa) yang lokasi kajiannya dipilih secara sengaja di Kabupaten Subang. Data yang digunakan terdiri dari: (1) Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang diperoleh dari Dinas Sosial Kabupaten Subang untuk mengetahui sebaran spasial kemiskinan di Kabupaten Subang, (2) Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa diperoleh dari DPMD Kabupaten Subang, Kementerian Desa serta desa terkait (3) Belanja Desa diperoleh dari desa maupun pendamping dari kementerian desa beserta Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Subang (3) Data Luas Wilayah, Luas Sawah serta Jarak Tempuh didapatkan dari Podes (Potensi Desa) yang dipublikasikan oleh BPS (4) Data pendukung lain yang diperoleh dari BPS baik tingkat nasional, Provinsi (Jawa Barat) maupun Kabupaten (Subang).

Analisis Data

Analisis Indeks Moran Global

Perhitungan Indeks Moran digunakan dengan tujuan untuk mengetahui indikasi terjadi atau tidaknya autokorelasi spasial pada variabel yang sama (Wuryandari *et al.*, 2014). Lee & Wong (2001) menjelaskan bahwa uji Moran bertujuan untuk mengetahui ketergantungan secara spasial antar wilayah amatan. Adapun Perhitungan Indeks Moran yaitu:

$$I = \frac{n \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n w_{ij} (x_i - \bar{x})(x_j - \bar{x})}{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2} \dots\dots\dots (1)$$

Keterangan:

- I = Indeks Moran
- n = Jumlah lokasi (amatan)
- x_i = Nilai pada lokasi i
- x_j = Nilai pada lokasi j
- \bar{x} = Nilai rata-rata dari x_i dari n lokasi
- Wij = Elemen pada pembobot terstandarisasi antara desa i dan j

Nilai ekspektasi dari uji Moran adalah:

$$E(I) = I_0 = \frac{-1}{N-1} \dots\dots\dots (2)$$

Terjadi autokorelasi jika:

$$Zhitung = \frac{I - I_0}{\sqrt{var(I)}} \sim N(0,1) \dots\dots\dots (3)$$

Terjadinya autokorelasi negatif jika nilai $-1 \leq I < 0$ sedangkan autokorelasi positif terjadi jika $0 < I \leq 1$. Sedangkan jika Indeks Moran memiliki nilai nol maka mengindikasikan wilayah tersebut tidak berkelompok.

Moran's Scatterplot

Lee & Wong (2001) menjelaskan bahwa untuk melihat kecenderungan umum dan pengelompokan wilayah dapat menggunakan *Moran Scatterplot*. *Moran Scatterplot* juga terdiri dari empat kuadran dimana kuadran tersebut memiliki implikasi terhadap lokasi amatan.

Kuadran I (*High-High*) memberikan indikasi lokasi yang mempunyai nilai pengamatan tinggi dikelilingi oleh wilayah amatan dengan nilai pengamatan tinggi. Kuadran II (*Low-High*) mengindikasikan lokasi yang memiliki nilai pengamatan rendah dikelilingi oleh lokasi dengan nilai pengamatan tinggi. Kuadran III (*Low-Low*), menunjukkan lokasi dengan nilai pengamatan rendah dikelilingi oleh lokasi dengan nilai pengamatan rendah. Kuadran IV (*High-Low*) mengindikasikan lokasi dengan nilai pengamatan tinggi di kelilingi oleh lokasi dengan nilai pengamatan rendah.

Identifikasi Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemiskinan di Kabupaten Subang

Analisis regresi berganda digunakan untuk mengetahui variabel atau faktor lain yang turut serta memberikan pengaruhnya terhadap kemiskinan di Kabupaten Subang. Pemilihan variabel ditentukan berdasarkan kepada tujuan kajian yang ingin dicapai serta didapatkan dari berbagai literatur dan penelitian terdahulu sehingga dapat menghasilkan model ekonometrika terbaik dalam proses analisis. Adapun model ekonometrika yang digunakan yaitu:

$$Y_t = \beta_0 + \beta_1 X1_t + \beta_2 X2_t + \beta_3 X3_t + \beta_4 X4_t + \beta_5 X5_t + \beta_6 X6_t + \epsilon_{it} \dots\dots\dots(4)$$

Keterangan:

- Y_t = Jumlah Penduduk Miskin per Luas Wilayah di Desa i tahun 2019 (Jiwa/Km²)
- $X1_t$ = Jarak Tempuh Desa i ke Ibukota Kabupaten (Km)
- $X2_t$ = Belanja Penyelenggaraan Pemerintah di Desa i tahun 2017 (Rupiah/Jiwa)
- $X3_t$ = Belanja Pembangunan di Desa i tahun 2017 (Rupiah/Jiwa)
- $X4_t$ = Belanja Pemberdayaan Masyarakat di Desa i tahun 2017 (Rupiah/Jiwa)
- $X5_t$ = Luas Sawah di Desa i (Km²)
- $X6_t$ = Luas Wilayah di Desa i (Km²)
- β_0 = Intersep
- $\beta_1 \dots \beta_6$ = Koefisien Regresi
- ϵ_{it} = Sisaan/standar *Error*

HASIL DAN PEMBAHASAN

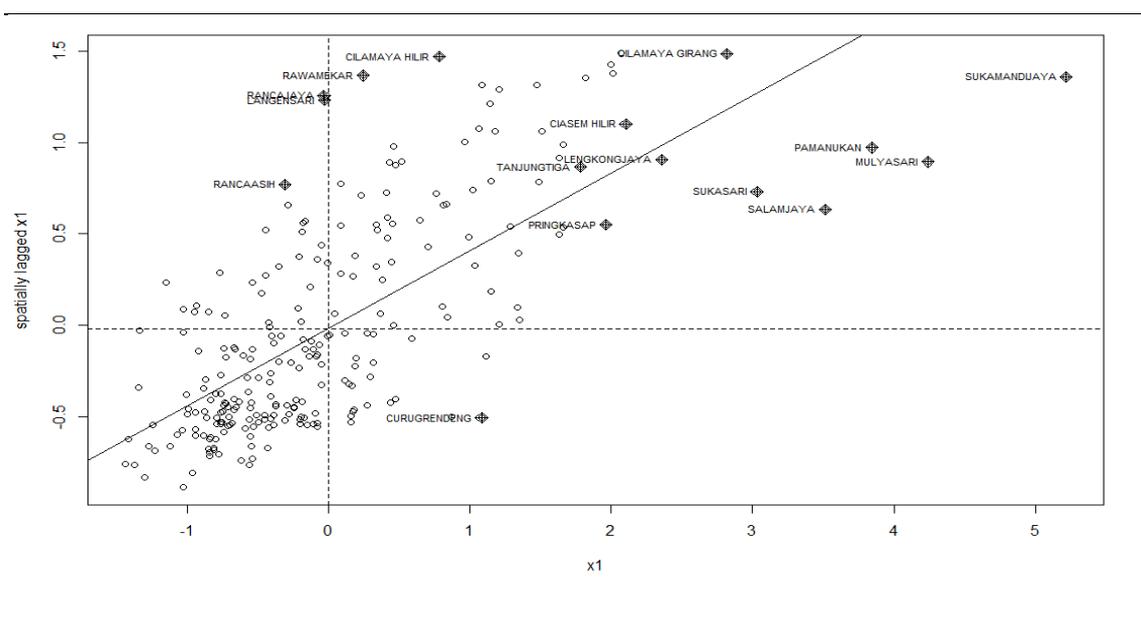
Analisis Indeks Moran

Analisis Indeks Moran dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui apakah suatu wilayah dapat terpengaruh dan mempengaruhi wilayah yang berada di sekitarnya. Hasil analisis Indeks Moran dengan menggunakan *software* R Studio menunjukkan bahwa nilai Indeks Moran lebih besar daripada *Expected Index* (Tabel 1). Sehingga didapatkan kesimpulan bahwa pola sebaran kemiskinan di Kabupaten Subang bersifat menggerombol (*clustered*). Hasil analisis juga menyimpulkan bahwa terdapat keterkaitan spasial secara global dan saling mempengaruhi antar wilayah di Kabupaten Subang.

Tabel 1. Hasil Analisis Indeks Moran

Indikator	Nilai	Indikator	Nilai
<i>Moran I Statistic</i>	0.42532	<i>Variance</i>	0.00039
<i>Expectation</i>	-0.00409	<i>Standar Deviate</i>	21.57

Guna mengetahui keterkaitan spasial secara lokal maka langkah selanjutnya adalah memetakan setiap unit amatan ke dalam *Moran Scatterplot* dengan tujuan untuk mengklusterisasi setiap unit amatan seperti yang terlihat dari Gambar 3. Hal ini dilakukan untuk mempermudah dalam proses perumusan kebijakan khususnya yang berada pada kluster berkategori *high-high*.



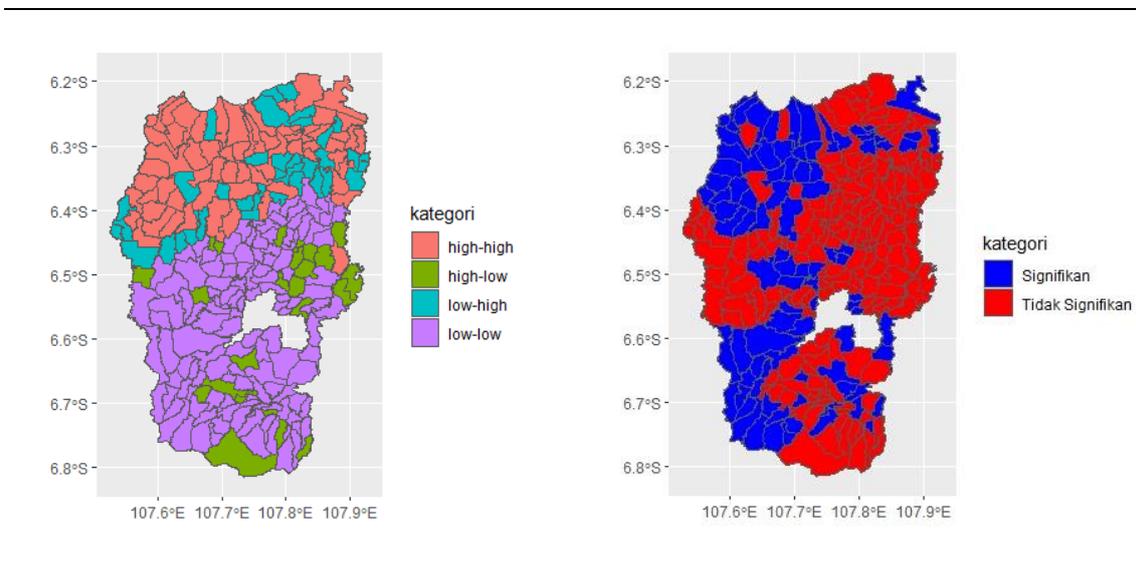
Gambar 3. Moran Scatterplot

Berdasarkan analisis spasial secara lokal dengan tingkat signifikansi 5% dapat diketahui wilayah mana yang termasuk kluster *Low-Low*, *Low-High*, *High-Low* maupun *High-High*. Dalam analisis hanya didapatkan dua kluster yang signifikan pada taraf nyata 5% yaitu kluster *High-High* dan kluster *Low-Low*. Terdapat 42 Desa di Kabupaten Subang yang termasuk kedalam kluster *High-High* dan 48 Desa yang termasuk ke dalam kluster *Low-Low* seperti yang terlihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Klasterisasi Unit Amatan di Kabupaten Subang

Klaster	Desa
<i>High-High</i>	Pabuaran, Salamjaya, Pringkasap, Karanghegar, Rancabango, Rancamulya, Gempolsari, Ciberes, Tambakjati, Jatiragas Hilir, Tanjung Rasa, Pasirbungur, Mekarsari, Pusakaratu, Sukasari, Batangsari, Mandalawangi, Rancahilir, Mulyasari, Lengkongjaya, Pamanukan Hilir, Pamanukan, Rancasari, Pinangsari, Sukahaji, Ciasem Girang, Ciasem Baru, Ciasem Hilir, Jatibaru, Dukuh, Ciasem Tengah, Sukamandijaya, Patimban, Karanganyar, Pusakajaya, Tanjungtiga, Muara, Blanakan, Jayamukti, Rawameneng, Cimaya Girang, Cilamaya Hilir
<i>Low-Low</i>	Cisaat, Palasari, Cibitung, Cibeusi, Nagrak, Ciater, Tambakan, Talagasari, Ponggang, Cintamekar, Cijengkol, Cikujang, Cipancar, Curugagung, Leles, Dayeuhkolot, Cicadas, Sukamandi, Sukakerti, Darmaga, Tenjolaya, Sukamelang, Cimanglid, Sirap, Cibuluh, Rancamanggung, Cirangkong, Sukahurip, Sadawarna, Cinangsi, Cibalandongjaya, Belendung, Cisaga, Marengmang, Kaliangsana, Batusari, Dawuan Kidul, Sukasari, Cisampih, Margasari, Jambelaer, Ciruluk, Belendung, Wanakerta, Kaunganten, Munjul, Margahayu, Bendungan

Gambar 3 menunjukkan bahwa Desa dengan kemiskinan tinggi lebih banyak terkonsentrasi di wilayah bagian utara sedangkan Desa dengan kemiskinan rendah terkonsentrasi di wilayah tengah dan selatan. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi terkonsentrasinya kemiskinan di wilayah utara. Aksesibilitas atau jarak merupakan salah satu faktor yang memberikan pengaruhnya terhadap kemiskinan di wilayah utara. Jarak yang cukup jauh ke ibukota Kabupaten akan menyebabkan beberapa aktifitas terhambat terutama kegiatan perekonomian karena membutuhkan waktu tempuh yang lama (Hasibuan et al., 2019). Selain itu, wilayah utara masih didominasi oleh sektor pertanian dimana seperti diketahui bahwa petani pada umumnya memiliki daya tawar yang rendah serta akses yang terbatas sehingga kemiskinan masih melekat pada sektor pertanian.



Gambar 4. Sebaran Spasial Kemiskinan di Kabupaten Subang (%)

Terjadinya autokorelasi spasial di setiap unit amatan menunjukkan bahwa kebijakan yang diambil harus sesuai dengan karakteristik wilayah tersebut sehingga pendekatan kebijakan yang diambil menjadi lebih tepat sasaran (Sukanto et al., 2019). Wilayah dengan klaster *high-high* dapat meningkatkan belanja bidang pemberdayaan untuk peningkatan ekonomi lokal berbasis potensi lokal baik dari Dana Desa maupun alokasi Belanja lainnya secara berkelanjutan sehingga diharapkan terjadinya peningkatan produktifitas masyarakat. Optimalisasi peran BUMDES menjadi penting terutama dalam hal yang berkaitan dengan

pemasaran produk pertanian. Hal ini disebabkan sebagian besar dari wilayah tersebut merupakan wilayah yang didominasi sektor pertanian. Sedangkan untuk wilayah yang berada pada kluster *low-low* pemerintah dapat mengoptimalkan lokasi-lokasi aglomerasi sebagai sarana untuk pemasaran produk olahan maupun produk pertanian. Hal ini dikarenakan wilayah dengan kluster *low-low* merupakan wilayah industri dan pariwisata. Kerjasama antar BUMDES yang berada di kluster *low-low* dapat menjadi opsi lainnya sehingga jejaring pemasaran dan kelembagaan dapat terbentuk. Hasibuan *et al.*, (2019) menekankan bahwa keseragaman kebijakan tanpa intervensi aspek spasial dan tanpa memperhatikan kesesuaian antara satu desa dengan lainnya akan menjadi sesuatu yang kontraproduktif dalam upaya pengentasan kemiskinan.

Faktor yang Mempengaruhi Kemiskinan di Kabupaten Subang

Uji asumsi dilakukan agar model ekonometrika dalam suatu model persamaan regresi dapat menjadi estimator atau penduga yang tak bias. Uji asumsi klasik meliputi uji kenormalan, multikolinearitas, heteroskedastisitas dan autokorelasi.

a. Uji Normalitas

Pada tahap awal uji asumsi klasik untuk mengetahui data berdistribusi normal atau tidak, dilakukan uji normalitas dan model regresi yang baik adalah jika data memiliki distribusi yang normal atau mendekati normal (Supriyadi *et al.*, 2017). Uji normalitas menunjukkan bahwa nilai *p-value* bernilai 0.66 lebih besar dari tingkat signifikansi (α) sebesar 5% sehingga dapat dikatakan bahwa data memiliki distribusi secara normal. Hasil uji dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3. Uji Normalitas

Test	W	P-Value
Shapiro Wilk	0.99	0.66

b. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen saling berkorelasi atau tidak. Terjadinya multikolinearitas dicerminkan dari nilai VIF (*Variance Inflation Factor*) dimana jika nilai VIF kurang dari 10 maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinearitas di antara variabel seperti yang terlihat pada Tabel 4.

Tabel 4. Uji Multikolinearitas

Test	X1	X2	X3	X4	X5	X6
Variance Inflation Factor	1.096	1.853	1.784	1.107	1.267	1.177

c. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastis digunakan untuk mengetahui apakah variansi dari galat bervariasi atau bersifat konstan. Heteroskedastis berarti juga bahwa sebaran atau variansi dari suatu pengamatan bersifat tidak konstan. Hasil uji heteroskedastisitas dengan menggunakan uji *Breusch Pagan* menghasilkan nilai *p-value* sebesar 0.208. Dengan tingkat signifikansi (α) sebesar 5% dimana *p-value* > α menjelaskan bahwa variansi dari galat bersifat homoskedastis.

Tabel 5. Uji Heteroskedastisitas

Breusch Pagan	df	P-Value
8.420	6	0.208

d. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi digunakan untuk mengetahui apakah antar sisaan (ϵ_t) terdapat korelasi dari waktu ke waktu. Uji yang dilakukan untuk mengetahui serta mendeteksi autokorelasi yaitu dengan melakukan uji *Durbin Watson* yang kemudian dibandingkan nilainya dengan yang terdapat pada Tabel *Durbin Watson*. Hasil uji pada R Studio menghasilkan nilai Durbin Watson sebesar 1.336. Dengan melakukan perbandingan pada tabel *Durbin Watson* dimana $k=7, n=242$ didapat nilai dL 1.737. Nilai DW yang lebih kecil dari dL ($DW < dL$) memberikan kesimpulan bahwa terdapat autokorelasi yang bersifat positif. Akan tetapi menurut Juanda (2009) data *cross section* tidak menutup kemungkinan terjadinya autokorelasi. Akan tetapi autokorelasi yang dimaksud merupakan autokorelasi spasial. Hal ini dikarenakan adanya suatu wilayah yang saling berdekatan dan memiliki indikator yang serupa. Korelasi yang terjadi merupakan korelasi dalam ruang atau tempat dan bukan merupakan korelasi antara data satu waktu ke waktu lainnya. Dengan keterangan tersebut maka model regresi yang digunakan cukup baik sebagai estimator untuk menduga kemiskinan di Kabupaten Subang.

Setelah uji asumsi klasik terpenuhi, dilakukan analisis regresi dengan menggunakan R Studio untuk mengetahui variabel atau variabel yang mempengaruhi kemiskinan di Kabupaten Subang (Tabel 6).

Tabel 6. Hasil Analisis Regresi

<i>Term</i>	<i>Coef</i>	<i>Std. Error</i>	<i>T-Value</i>	<i>P-Value</i>
Constant	16.958	0.683	24.826	0.000*
JT (X1)	0.253	0.039	6.386	0.000*
BPPH (X2)	-0.537	0.072	-7.396	0.000*
BPPN (X3)	-0.272	0.062	-4.372	0.000*
BPMKT (X4)	-0.049	0.017	-2.776	0.000*
LS (X5)	0.137	0.023	5.738	0.000*
LW (X6)	-1.117	0.045	-26.352	0.000*

Keterangan:

* : nyata pada taraf 1 %

Hasil analisis menunjukkan besarnya nilai *R square* adalah 79.76%. Sehingga keragaman kemiskinan di Kabupaten Subang dapat dijelaskan 79.76% oleh variabel *independent* (bebas) yang berada dalam model sedangkan 21.24% sisanya dijelaskan oleh variabel di luar model. Sehingga model persamaan regresinya sebagai berikut:

$$Y = 16.958 + 0.253X1 - 0.537X2 - 0.272X3 - 0.049X4 + 0.137X5 - 1.117X6 \dots\dots\dots (5)$$

Model regresi menunjukkan bahwa komponen Dana Desa yang terdiri dari variabel Belanja Bidang Pemerintahan, Belanja Pembangunan, Belanja Pembinaan dan Belanja Pemberdayaan berpengaruh nyata dan memiliki pengaruh yang negatif pada taraf nyata 1% terhadap kemiskinan di Kabupaten Subang. Kajian ini menggunakan persamaan regresi linear berganda, dimana terdapat transformasi variabel ke dalam bentuk logaritma natural sehingga nilai koefisien regresi merupakan nilai elastisitasnya. Variabel Belanja Penyelenggaraan Pemerintah (X2) memiliki koefisien sebesar 0.537 dan memiliki pengaruh yang negatif terhadap kemiskinan. Belanja Bidang Pemerintahan (X2) yang terukur seiring dengan peningkatan kapasitas dan kualitas aparatur desa tentu akan membuat pelayanan pemerintah desa terhadap masyarakat semakin membaik. Selain itu, peningkatan kapasitas dan kualitas dari aparatur desa diharapkan mampu memecahkan permasalahan yang terjadi di desa dengan kualitas gagasan yang solutif. Yunianingrum & Kolopaking (2018) menyebutkan bahwa kemampuan teknis, kemampuan sosial dan kemampuan konseptual

merupakan komponen yang harus dimiliki oleh aparat desa dalam menjawab tantangan dan permasalahan di desa.

Variabel Belanja Pembangunan (X3) pada taraf nyata 1% memiliki koefisien sebesar 0.272 dan berpengaruh negatif terhadap kemiskinan di Kabupaten Subang. Belanja Pembangunan meliputi pembuatan jalan, drainase, dan pekerjaan fisik lainnya yang bersifat padat karya bertujuan untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat. Jenis belanja ini diharapkan mampu untuk mengurangi pengangguran dan kemiskinan dengan penyerapan tenaga kerja yang tinggi (Manembu *et al.*, 2019). Selain itu Sukanto *et al.*, (2019) menjelaskan bahwa di areal perdesaan pembangunan dapat terfokus pada pembuatan jalan baik jalan desa maupun jalan untuk usaha tani sehingga berdampak kepada peningkatan pendapatan masyarakat.

Belanja Pemberdayaan (X4) dalam model regresi juga menunjukkan hubungan yang negatif dengan kemiskinan di Kabupaten Subang dan berpengaruh nyata pada taraf nyata 1%. Belanja Pemberdayaan (X4) merupakan belanja yang dialokasikan sebagai upaya yang dilakukan pemerintah dalam mendorong masyarakat menjadi lebih produktif. Arfianto & Balahmar (2014) menyebutkan bahwa pemberdayaan terhadap kelompok masyarakat merupakan salah satu upaya yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan taraf hidup masyarakat sehingga mampu terlepas dari perangkap kemiskinan.

Selain Belanja Desa, faktor lainnya yang berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan di Kabupaten Subang pada taraf nyata 1% yaitu Jarak tempuh dari Desa ke Ibukota Kabupaten (X1), Luas Sawah (X5), serta Luas Wilayah (X6). Variabel jarak tempuh (X1) memiliki pengaruh yang positif dengan kemiskinan dengan koefisien sebesar 0.253. Seperti diketahui bahwa aksesibilitas menjadi penting dalam aliran distribusi barang dan jasa sehingga akan berdampak kepada aktifitas perekonomian secara makro. Irawadi *et al.*, (2020) menyebutkan bahwa perbaikan maupun pembangunan akses jalan akan berdampak langsung terhadap berkurangnya waktu tempuh sehingga diharapkan dapat menjadi pengungkit perekonomian masyarakat. Selain itu, Nurwati (2008) dalam kajiannya menyebutkan bahwa faktor yang berkorelasi terhadap kemiskinan salah satunya adalah keterbatasan akses terhadap pelayanan dasar dan infrastruktur.

Variabel Luas Sawah (X5) memiliki korelasi yang positif terhadap kemiskinan di Kabupaten Subang dengan koefisien sebesar 0.137. Konstruksi logis dari hasil analisis ini bahwasanya desa atau perdesaan merupakan wilayah yang identik dengan kemiskinan. Ditambah dengan rata-rata petani di Subang merupakan petani penggarap dimana pendapatan petani ditentukan berdasarkan sistem bagi hasil dengan pemilik lahan. Hal ini yang menyebabkan pendapatan petani menurun dan berpengaruh terhadap daya beli petani. Selain itu, permasalahan lainnya untuk petani sebagai pemilik lahan adalah daya tawar yang rendah terhadap pembeli dimana peran pembeli didominasi oleh para tengkulak dan harga yang ditentukan oleh pembeli sehingga berdampak pada konversi lahan yang terjadi di Kabupaten Subang. Nashwari *et al.*, (2016) dalam kajiannya menyebutkan bahwa keputusan pengalihan lahan yang dilakukan petani merupakan keputusan yang rasional karena dengan keputusan tersebut petani berekspektasi terhadap pendapatan totalnya baik jangka pendek atau jangka panjang. Selain itu, kajian Artino *et al.*, (2019) juga menunjukkan bahwa terdapat keterkaitan atau pengaruh luasan sawah terhadap kemiskinan menghasilkan nilai koefisien yang beragam dimana pengaruh luas sawah berkorelasi positif di bagian timur dan berkorelasi negatif terhadap kemiskinan di bagian barat Kabupaten Lombok Utara.

Luas wilayah menjadi salah satu faktor lainnya yang berpengaruh negatif terhadap kemiskinan di Kabupaten Subang dengan koefisien sebesar 1.117. Koefisien bernilai negatif dari hasil analisis tidak serta merta menunjukkan interpretasi yang berseberangan dalam artian bahwa kenaikan luas wilayah akan memberikan pengaruh terhadap penurunan kemiskinan di wilayah tertentu. Hal ini dikarenakan kemiskinan yang diukur merupakan

jumlah penduduk miskin dibagi dengan luas wilayah sehingga variabel Y (kemiskinan) merupakan variabel kepadatan penduduk miskin di wilayah tersebut sehingga korelasi luas wilayah terhadap kemiskinan didapat melalui transmisi kepadatan wilayah tersebut (penduduk miskin/luas wilayah).

Mekanisme transmisinya adalah wilayah atau desa yang luasannya lebih luas cenderung memiliki tingkat kepadatan wilayah yang rendah dengan tingkat kemiskinan cenderung tinggi yang umumnya merupakan wilayah pertanian. Sedangkan wilayah atau desa dengan luasan yang kecil memiliki kepadatan penduduk yang tinggi dengan tingkat kemiskinan yang rendah. Hal ini menyebabkan terjadinya migrasi penduduk ke wilayah yang luasannya lebih kecil akibat adanya magnet atau aktivitas ekonomi yang sangat tinggi. Sehingga semakin luas suatu wilayah akan mengakibatkan kepadatan wilayah lebih rendah dan tingkat kemiskinan pun akan semakin tinggi.

KESIMPULAN

Sebaran spasial kemiskinan secara global di Kabupaten Subang mempunyai karakteristik atau pola sebaran bersifat menggerombol (*cluster*) dimana terdapat 48 desa yang termasuk dalam *cluster high-high* dan 42 desa termasuk ke dalam *cluster low-low*. Variabel yang berpengaruh negatif terhadap kemiskinan di Kabupaten Subang yaitu Belanja Penyelenggaraan Pemerintah (X2), Belanja Pembangunan (X3), dan Belanja Pemberdayaan Masyarakat (X4) yang merupakan komponen dari Dana Desa. Sedangkan variabel yang berpengaruh positif yaitu Jarak Tempuh (X1), Luas Sawah (X5), dan Luas Wilayah (X6) melalui transmisi kepadatan wilayah.

Belanja Penyelenggaraan Pemerintah (X2) dan Belanja Pembangunan (X3) memiliki pengaruh yang besar dalam upaya pengentasan kemiskinan di Kabupaten Subang yang dapat dilihat dari koefisien masing-masing variabel sebesar 0.537 dan 0.272. Artinya pemerintah Kabupaten Subang dapat meningkatkan porsi belanja untuk kedua pos belanja ini baik dari Belanja Penyelenggaraan Pemerintah (X2) maupun Belanja Pembangunan (X3) dengan tetap melakukan perencanaan belanja yang efektif dan efisien sesuai dengan asas proporsionalitas. Belanja Penyelenggaraan Pemerintah (X2) yang berdampak kepada peningkatan kapasitas sumber daya aparatur dapat lebih dioptimalkan sehingga pelayanan publik kepada masyarakat dapat jauh lebih baik. Selain itu, Pemerintah Desa dapat membuat aturan untuk memaksimalkan penggunaan tenaga kerja lokal yang berada di wilayah tersebut untuk kegiatan belanja yang bersifat fisik seperti perbaikan sarana maupun prasarana, rehabilitasi gedung desa dan kegiatan fisik lainnya di lingkungan pemerintahan desa. Sehingga dengan adanya kebijakan tersebut, masyarakat sekitar dapat menjadi pemain utama dalam proses pembangunan di wilayahnya. Hal yang sama berlaku untuk Belanja Pembangunan (X3), dimana belanja yang berbasis fisik seperti jalan, irigasi, saluran air, dan sebagainya dapat memaksimalkan potensi tenaga kerja lokal yang tersedia di wilayah tersebut sesuai dengan karakteristik dari wilayah tersebut. Sehingga dengan adanya kebijakan tersebut diharapkan kesejahteraan masyarakat dapat semakin meningkat serta masalah sosial seperti kemiskinan dan pengangguran dapat teratasi. Selain itu, Belanja Pemberdayaan Masyarakat (X4) memiliki pengaruh yang sangat kecil jika dibandingkan dengan Belanja Penyelenggaraan Pemerintah (X2) dan Belanja Pembangunan (X3) sehingga perlu dilakukan intervensi dan evaluasi oleh Pemerintah Kabupaten Subang agar optimasi Belanja Pemberdayaan Masyarakat (X4) menjadi lebih terarah serta tepat sasaran sehingga dapat dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat. Pengambilan kebijakan juga harus mempertimbangkan aspek spasial atau karakteristik dari suatu wilayah sehingga perumusan kebijakan dapat tepat sasaran sesuai dengan program yang sudah direncanakan baik di tingkat Pemerintah Kabupaten Subang maupun di tingkat pemerintahan desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Arfianto, A. E. W., & Balahmar, A. R. U. (2014). Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan Ekonomi Desa. *JKMP (Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik)*, 2(1), 53-66. <https://doi.org/10.21070/jkmp.v2i1.408>
- Artino, A., Juanda, B., & Mulatsih, S. (2019). The Relationship of Village Funds to Poverty. *Tataloka*. 21(3):381–389. <https://doi.org/10.14710/tataloka.21.3.381-389>.
- Azhari. (2019). *Efektivitas Dana Desa terhadap Pengentasan Kemiskinan di Kabupaten Lebak, Provinsi Banten*. [Tesis, IPB University].
- Aziz, N. L. L. (2016). Otonomi Desa dan Efektivitas Dana Desa. *Jurnal Penelitian Politik*. 13(2):193–211. <https://doi.org/10.14203/JPP.V13I2.575>.
- Bourguignon F. (2004). *The Poverty, Growth, Inequality Triangle (ICRIER Working Paper No.125)*. Indian Council for Research on International Economic Relations. <http://www.icrier.org/pdf/wp125.pdf>.
- Badan Pusat Statistik. (2019). Tingkat Kemiskinan Kota, Desa, dan Desa Kota. Diakses dari <https://www.bps.go.id/statictable/2014/01/30/1494/jumlah-penduduk-miskin-persentase-penduduk-miskin-dan-garis-kemiskinan-1970-2017.html>.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat. (2020). Jumlah Penduduk Miskin Menurut Kabupaten dan Kota di Jawa Barat. Diakses dari <https://jabar.bps.go.id/indicator/23/51/1/persentase-penduduk-miskin.html>.
- Hasibuan, S. N., Juanda, B., & Mulatsih, S. (2019). Analisis Sebaran dan Faktor Penyebab Kemiskinan Di Kabupaten Bandung Barat. *Jurnal Agribisnis Indonesia*. 7(2):79–91. <https://doi.org/10.29244/jai.2019.7.2.79-91>.
- Irawadi, A., Juanda, B., & Munibah, K. (2020). Analisis Kemiskinan Spasial dan Kaitannya dengan Sertifikasi dan Penggunaan Lahan Pertanian di Kabupaten Mamuju. *Tataloka*. 22(1): 70–82. <https://doi.org/10.14710/tataloka.22.1.70-82>.
- Juanda, B. (2009.). *Ekonometrika Pemodelan dan Pendugaan*. Bogor:IPB Press.
- Juanda, B., & Heriwibowo, D. (2016). Konsolidasi Desentralisasi Fiskal Melalui Reformasi Kebijakan Belanja Daerah Berkualitas. *Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik*. 7(1):15–28.
- Lee, J., & Wong, D. W. S. (2001). *Statistical Analysis with ArcView GIS*. New Jersey (US): John Wiley & Sons Inc.
- Lin, J. Y. F., & Zhiqiang Liu. (2000). Fiscal Decentralization and Economic Growth in China. *Journal of Economic Development and Cultural Change*. 49(1):1–21. <https://doi.org/10.1080/00036840903427208>
- Manembu, R. R., Kusen, A. W. S., & Deeng, D. (2019). Padat Karya Sebagai Kontribusi Kehidupan Masyarakat Pada Penggunaan Dana Desa (Studi Kasus Desa Kaneyan Kecamatan Tareran Kabupaten Minahasa Selatan). *Holistik*. 2(2): 1–21.
- Mehta, A. K., Bhide, S., Kumar, A., & Shah, A. (2018). *Poverty, Chronic Poverty and Poverty Dynamics: Policy Imperatives*. Singapore:Springer. <https://doi.org/10.1007/978-981-13-0677-8>.
- Nashwari, I. P., Rustiadi, E., & Siregar, H. (2016). Analisis Spasial Kelembagaan Petani dan Kemiskinan Petani Tanaman Pangan Menggunakan Geographically Weighted Regression (GWR) di Provinsi Jambi. *Majalah Ilmiah Globe*. 18(2):83–94..
- Nurwati, N. (2008). Kemiskinan: Model Pengukuran, Permasalahan dan Alternatif Kebijakan. *Jurnal Kependudukan Padjadjaran*. 10(1):245-387.
- Rustiadi, E., Saefulhakim, S., & Panuju, D. R. (2011). *Perencanaan dan Pengembangan Wilayah*. Jakarta:Crestpent Press dan Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Sugiyarto, Mulyo, J. H., & Seleky, R. N. (2015). Kemiskinan Dan Ketimpangan Pendapatan Rumah Tangga di Kabupaten Bojonegoro. *Jurnal Agro Ekonomi*. 26(2):115–120. <https://doi.org/10.22146/agroekonomi.17264>.
- Sukanto, S., Juanda, B., Fauzi, A., & Mulatsih, S. (2019). Analisis Spasial Kemiskinan dengan Pendekatan Geographically Weighted Regression: Studi Kasus Kabupaten Pandeglang dan Lebak. *Tataloka*. 21(4):669-677. <https://doi.org/10.14710/tataloka.21.4.669-677>.
- Supriyadi E., Mariani S., & Sugiman. (2017). Perbandingan Metode Partial Least Square (PLS) dan Principal Component Regression (PCR) untuk Mengatasi Multikolinearitas pada Model Regresi Linear Berganda. *Unnes Journal of Mathematics*. 6(2):117–128. <https://doi.org/10.15294/ujm.v6i2.11819>.
- Wuryandari, T., Hoyyi, A., Kusumawardani, D. S., & Rahmawati, D. (2014). Identifikasi Autokorelasi Spasial Pada Jumlah Pengangguran di Jawa Tengah Menggunakan Indeks Moran. *Media Statistika*. 7(1):1–10. <https://doi.org/10.14710/medstat.7.1.1-10>.
- Yunianingrum, Y., & Kolopaking, L. M. (2018). Kemampuan Aparat Pemerintah Desa dan Efektivitas Pengelolaan Keuangan Desa. *JKSPM*. 2(4):495–508. <https://doi.org/10.29244/jskpm.2.4.495-508>.